

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kualitas audit ialah kunci utama untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah bersifat akuntabel dan terbuka. Dalam konteks sektor publik, audit sebagai alat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan administratif saja. Hasil audit dianggap berkualitas apabila auditor sanggup mengungkap kondisi yang sebenarnya dalam laporan keuangan, terutama jika ada pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, laporan keuangan dapat terhindar dari kesalahan penyajian yang bersifat material.

Di Indonesia, upaya peningkatan mutu audit dilakukan dengan menerapkan standar audit yang berpedoman pada ketentuan dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Kualitas audit sangat penting diperhatikan guna memastikan transparansi pelaporan keuangan negara serta menjadi isu yang perlu diperhatikan jika terlihat adanya keraguan terhadap auditor. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat tugas untuk mengaudit keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini yaitu untuk mengonfirmasi bahwa cara pemerintah menangani dan melaporkan keuangannya dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab, dengan mengikuti aturan yang tepat dan praktik tata kelola yang baik. (Simangunsong & Salim, 2023).

Seorang auditor dituntut untuk senantiasa menjaga kualitas audit karena tingkat keandalan laporan keuangan sangat bergantung pada bagaimana proses audit tersebut dilaksanakan. Akan tetapi, kepercayaan masyarakat terhadap hasil audit saat ini masih sering dipertanyakan mengingat masih banyak kasus kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan audit laporan keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, seorang auditor perlu memberikan opini yang adil dan tidak bias yang sesuai dengan temuan dari audit yang telah mereka lakukan.

BPK memiliki kewenangan untuk melakukan audit atau inspeksi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 yang mengatur tentang audit manajemen keuangan negara dan pertanggungjawaban, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang menguraikan struktur dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia. Sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan, BPK bertugas mengawasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pelaksanaan fungsi tersebut dijalankan sesuai ketentuan yang diatur di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 mengenai Badan Pemeriksa Keuangan

Lembaga audit eksternal nasional, BPK melaksanakan audit keuangan, kinerja, dan berorientasi tujuan serta peninjauan kinerja pemerintah daerah (Theresia Muhul dkk., 2026). Mengacu pada publikasi Warta BPK.go.id dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025, BPK berhasil mengamankan uang negara senilai Rp69,21 triliun. Capaian tersebut berasal dari temuan kerugian negara, potensi

kerugian, kekurangan penerimaan, serta upaya perbaikan tata kelola pada berbagai sektor. Selama Semester I Tahun 2025, BPK telah menyelesaikan laporan sebanyak 741 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mencakup 701 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja, dan 36 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Salah satu peristiwa yang pernah menjadi sorotan terkait kualitas audit di Indonesia adalah kasus PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 2020. Perusahaan tersebut diketahui melakukan manipulasi laporan keuangan sejak tahun 2006. Selama periode ini, BPK tidak menyampaikan opini atas laporan keuangan tahun 2006–2007 karena rincian tentang cadangan tidak dapat di verifikasi kebenarannya. Hal tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 16,81 triliun. Kasus ini mengindikasikan tantangan yang dihadapi BPK dalam mengidentifikasi kecurangan dan kesalahan material yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Adapun tahun pada tahun 2022 terdapat kasus yang menyoroiti sikap independensi, profesionalisme, dan integritas auditor yang terjadi pada Pemkab Bogor terkait kasus suap. Pada kasus ini, KPK menetapkan Ade Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada auditor BPK Perwakilan Jawa Barat agar Pemkab Bogor memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Diduga terdapat pemberian uang senilai Rp 100 juta untuk mengatur tim pemeriksa dan kemudian berlanjut dengan pemberian uang selama proses audit hingga mencapai Rp 1,9 miliar. Hal ini diduga agar tidak mengungkap temuan yang dapat memengaruhi opini audit.

Selain itu, akhir-akhir ini juga terdapat kasus terbaru terkait kasus suap audit perihal pengadaan *smart board* Pemkab Muara Enim yang diduga melibatkan BPK Perwakilan Sumatera Selatan dan sedang ditangani oleh KPK. Kasus ini berawal ketika auditor BPK menemukan sejumlah penyimpangan dalam laporan keuangan daerah yang melebihi batas materialitas. Temuan tersebut diubah agar hasil audit menjadi lebih baik, dan diduga terjadi negosiasi yang disertai permintaan imbalan sekitar Rp 1,6 miliar. Atas kasus tersebut, KPK menetapkan beberapa tersangka yang berasal dari unsur pemerintah daerah, pihak swasta, dan auditor BPK.

Berbagai kasus selain yang telah disebutkan sebelumnya masih menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan audit laporan keuangan dengan standar audit yang berlaku. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan mutu hasil audit dan menimbulkan keraguan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan terhadap integritas auditor dalam menjalankan tugas profesinya. Oleh karena itu, kualitas audit BPK menjadi kunci penting yang perlu diperhatikan guna menjaga serta meningkatkan kembali kepercayaan publik. Kualitas audit dapat diartikan ketika auditor menemukan kesalahan besar dalam laporan keuangan dan kemudian mengungkapkannya dalam hasil pemeriksaan (De Angelo dalam Junaidi dan Nurdiono, 2016). Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh beberapa unsur di antaranya yaitu *time budget pressure*, profesionalisme, dan independensi auditor.

*Time budget pressure* dalam pelaksanaan audit dapat memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap kualitas hasil pemeriksaan karena

auditor dituntut menyelesaikan pekerjaannya sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Situasi tersebut mengharuskan auditor mengatur dan memanfaatkan waktu secara efisien pada setiap tahapan audit yang dilakukan (Rafiskalina, 2021). Namun demikian, apabila auditor mampu mengelola serta mengantisipasi dampak dari *time budget pressure* dengan baik, maka kualitasnya akan menjadi lebih optimal (Rosini & Rahman Hakim, 2021).

Selain faktor waktu, sikap profesional juga menjadi unsur penting yang harus dimiliki auditor dalam menjalankan pekerjaannya. Profesionalisme dapat dimaknai sebagai kemampuan auditor untuk melaksanakan tugas dengan hati-hati dan berdedikasi tinggi. Seorang auditor yang profesional dituntut bekerja secara jujur serta berhati-hati dalam setiap penugasan yang diterimanya. Auditor seharusnya menggunakan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk memastikan bahwa mereka memiliki cukup keyakinan bahwa laporan keuangan yang diperiksa disajikan secara wajar. Hal ini termasuk kesalahan yang terjadi secara tidak sengaja maupun penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja.

Selain *time budget pressure* dan profesionalisme, sikap independensi juga perlu diperhatikan oleh seorang auditor. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017) mendefinisikan independensi sebagai proses melaksanakan audit tanpa memihak pihak manapun. Independensi auditor merujuk pada prinsip objektivitas yang harus dijaga oleh seorang auditor ketika menelaah laporan keuangan yang disusun oleh

pihak manajemen tanpa memberikan keberpihakan kepada pihak manapun (Dahlan, 2013). Independensi auditor dapat terganggu apabila ada hubungan pribadi, tekanan dari atasan, dan atau intervensi dari pihak *auditee*. Hal ini berpotensi menurunkan objektivitas dan kualitas audit yang telah dicapai.

Berdasarkan riset yang dilaksanakan oleh Rimna Redita & Dwi Cahyo (2025), Muhammad Novian Gilang Ramadhan & Condro Widodo (2025), dan Bayu et al., (2023), menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan kombinasi variabel yang diuji, seperti halnya *time budget pressure*, independensi atau profesionalisme, akuntabilitas, kompetensi, dan pengalaman auditor. Namun, penggabungan variabel *time budget pressure* dengan faktor internal auditor seperti independensi dan profesionalisme dalam satu model penelitian yang komprehensif masih terbatas, khususnya pada auditor sektor publik. Selain itu, pada penelitian sebelumnya sebagian besar dilakukan pada auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) di sektor swasta yang berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Sementara itu, BPK mengikuti Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN), yang menuntut tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi kepada publik. Perbedaan dalam struktur lembaga ini dapat memengaruhi seberapa besar tekanan yang dirasakan auditor dalam hal waktu dan anggaran, seberapa independen mereka, dan seberapa profesional mereka terhadap pekerjaannya yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas audit, sehingga perlu diteliti lebih lanjut.

Dari sudut pandang teori agensi, terdapat masalah bagi auditor independen ketika mereka menghadapi keterbatasan waktu dan anggaran yang ketat. Auditor berusaha sebaik mungkin untuk melakukan audit yang memastikan agen bertindak demi kepentingan terbaik *principal* dan untuk menemukan kesalahan penyajian (Rimna dan Dwi, 2025). Yahaya et al. (2024) mengatakan bahwa independensi auditor sangat penting karena membantu memastikan bahwa setiap evaluasi tetap adil dan tidak dipengaruhi oleh agen. Sementara itu, teori agensi mengatakan bahwa ketika auditor memiliki sikap independen yang tinggi, hal tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas audit. Hal ini dikarenakan auditor yang independen dapat melihat berbagai hal tanpa bias atau memihak, sehingga membantu melindungi kepentingan orang-orang yang memiliki atau bertanggung jawab atas perusahaan (Rimna dan Dwi, 2025). Selama proses audit, auditor harus menunjukkan profesionalisme ketika mengungkapkan laporan keuangan untuk mencegah kesalahan dan memastikan audit berkualitas tinggi untuk membantu *principal*.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui berbagai faktor yang dapat memengaruhi kualitas audit, khususnya pada lembaga pemeriksa keuangan negara seperti BPK. Hasil pemeriksaan yang dihasilkan auditor memiliki peran penting karena menjadi pedoman dalam hal pengambilan keputusan publik serta penetapan kebijakan di bidang keuangan negara. Di samping itu, temuan riset ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk BPK dalam hal peningkatan kualitas audit dan performa auditor melalui pengelolaan waktu yang lebih baik, penguatan

profesionalisme, serta pemeliharaan sikap independen dalam menjalankan tugas pemeriksaan.

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian yang berjudul “Pengaruh Time Budget Pressure, Profesionalisme, dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah ada pengaruh antara *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah ada pengaruh antara profesionalisme auditor terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah ada pengaruh antara independensi auditor terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Apakah ada pengaruh secara simultan pada *time budget pressure*, profesionalisme, dan independensi auditor terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Untuk mengetahui pengaruh sikap profesionalisme auditor terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Untuk mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Untuk mengetahui pengaruh *time budget pressure*, profesionalisme, dan independensi auditor terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan mampu memberikan bukti nyata tentang bagaimana hubungan antara *time budget pressure*, profesionalisme, dan independensi auditor dengan kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil studi ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya tentang kualitas audit, terutama berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhinya pada organisasi sektor publik maupun lembaga pemeriksa pemerintah.

2. Bagi Auditor BPK Yogyakarta

Diharapkan hasil studi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengelola tekanan anggaran waktu, memperkuat profesionalisme, serta mempertahankan independensi sehingga kualitas audit yang dihasilkan dapat semakin baik meskipun dihadapkan pada keterbatasan waktu.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang meliputi lima bab yang saling berkaitan diantaranya:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai definisi variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang meliputi penyajian data analisis data yang diperoleh selama penelitian dan merupakan jawaban dari pertanyaan dari rumusan masalah dengan alternatif penyelesaian.

## BAB V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang didapat dari pembahasan dan hasil selama penelitian serta saran yang dibuat sesuai dengan kesimpulan yang didapatkan.